
Transformasi E-KTP menjadi KTP Digital melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Bulak Banteng

Aisyah Aulia Zahro, Elli Setiyo Wahyuni
email: aisyahauliazahro14@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Hang Tuah

Abstract.

The Surabaya City Dukcapil Office has introduced the Digital Population Identity (DPI), an online tool that aims to enhance population administration services by making them more streamlined and efficient. This research aims to assess the utilisation of the DPI Application in promoting efficient population administration in the Bulak Banteng Subdistrict. The research employed a descriptive method with a qualitative approach. The research findings indicate that citizen engagement in utilising the DPI application is manifested through the perceived advantages experienced by residents, such as convenience, time-saving, and the ability to register from anywhere, eliminating the need to visit the office. Consequently, individuals only need to visit Bulak Banteng Subdistrict to collect their prepared documents. Nevertheless, not all individuals opt for services solely through the DPI programme, as there are still inhabitants who remain unaware of the availability of services facilitated by the DPI application. Individuals exhibit a greater level of ease when the service is delivered directly to their workplace, as there is a presumption that utilising the programme will be more challenging. Therefore, this study concludes that the Surabaya City Dukcapil Department's innovation of providing services through the DPI application offers convenience to the community, particularly millennials. However, the implementation of the introduction is suboptimal, and there are instances where the application service is inaccessible to the community, thereby impacting people's willingness to use the DPI application

Keywords : *Community Participation, Orderly Administration, IKD Application*

PENDAHULUAN

Tanggung jawab utama pegawai negeri sipil, termasuk pegawai negara dan pegawai negeri, adalah melakukan pelayanan publik (Wakhid, n.d.). Sebaliknya, efektivitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah dapat dinilai dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan tersebut (Sri Maulidiah, 2023). Pelayanan publik mengalami kemajuan yang signifikan, baik yang mencakup penyampaian layanan secara manual maupun online (Prasetyo dkk., 2022). Tugas yang disebutkan dalam alinea keempat

Pembukaan UUD 1945 mencakup empat aspek pokok pelayanan mendasar aparatur kepada masyarakat. Aspek-aspek tersebut antara lain menjaga segenap bangsa Indonesia dan warga negaranya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, mendorong perkembangan intelektual bangsa, dan menegakkan ketertiban global. Didirikan berdasarkan prinsip kebebasan, ketenangan abadi, dan perlakuan adil bagi semua. Selain itu, Keputusan Menteri PANRB No. 63 Tahun 2003 memberikan petunjuk rinci dalam

penyelenggaraan pelayanan publik (Rukayat, 2017).

Dengan kemajuan teknologi, berbagai aspek kehidupan manusia telah mengalami transformasi. Perubahan yang terjadi adalah peralihan dari cara manual atau konvensional ke sistem digital (Danuri et al., 2019). Khususnya pada sektor pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah. Pertumbuhan teknologi ini berdampak pada diperkenalkannya program-program online yang menyediakan berbagai macam atau model pelayanan publik. Selain itu, kemajuan teknologi seluler telah memungkinkan masyarakat umum mengakses dokumen kependudukan digital. Aplikasi seluler menawarkan akses mudah dan cepat untuk mengidentifikasi informasi, memungkinkan berbagai transaksi dan layanan sehari-hari.

E-Government memanfaatkan teknologi informasi serta internet guna meningkatkan penyampaian layanan publik, menjadikannya lebih efisien, cepat, serta dapat diakses oleh masyarakat dengan biaya terjangkau (Salsabila et al., 2022). Hal ini meliputi bermacam layanan administrasi kependudukan, antara lain pendaftaran kependudukan, penerbitan kartu identitas, pemutakhiran data kependudukan, serta layanan daring lainnya yang bisa dilakukan akses melewati platform digital. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan daya tanggap pelayanan publik yang berkaitan dengan kependudukan. Di samping itu, pemanfaatan teknologi internet di pemerintahan bisa menaikkan efektivitas prosedur administrasi, menurunkan birokrasi, serta menaikkan ketepatan data demografi.

Penerapan transformasi digital memiliki peran krusial dalam memberi dorongan inovasi serta meningkatkan produktivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menyadari pentingnya

pemberian layanan publik, serta kemajuan teknologi, sangatlah penting karena memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat di seluruh dunia (Apriliani dkk., 2021).

Transformasi digital pada layanan publik mencakup lebih dari sekedar konversi data ke dalam format digital. Hal ini juga memerlukan modernisasi sistem teknologi informasi yang sudah ketinggalan zaman, sehingga dapat beradaptasi terhadap tuntutan layanan publik yang berubah dengan cepat. Transformasi ini bertujuan untuk memberi efek positif bagi masyarakat serta pemerintahan dengan melakukan pembangunan sistem administrasi yang lebih kontemporer, efisien, serta berorientasi pada pelayanan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri Indonesia sudah memperkenalkan semacam inovasi di bidang Administrasi Kependudukan yang disebut peralihan dari KTP elektronik ke KTP Digital.

Kartu identitas elektronik yakni dokumen yang sangat rentan serta sering kali rentan terhadap penyalahgunaan serta pemalsuan. Terdapat kesalahpahaman yang meluas di kalangan individu mengenai KTP elektronik palsu, yang dapat dibuat dengan memanipulasi informasi atau menggunakan data pribadi orang lain. Di antara berbagai contoh penyalahgunaan data pribadi, contohnya mencakup perdagangan gelap data pribadi, pengungkapan informasi rekening nasabah bank tanpa izin, aktivitas penipuan yang meluas termasuk penggunaan data pribadi orang lain, dan peretasan akun pribadi melewati jaringan internet. (Sinaga, Erlina Maria Christian, dan Putri Mery Christian, 2020).

Saat ini masyarakat sudah terbiasa memiliki KTP elektronik berwujud yang mudah dibawa-bawa, seperti di saku atau dompet. Meski demikian, pencetakan KTP

elektronik memerlukan biaya. Perorangan mengajukan permohonan penerbitan ulang KTP elektronik apabila terjadi kerusakan, kehilangan, perubahan unsur biodata, atau perubahan alamat domisili. Penulis karya ini adalah Trisna dan Azizah, dan karya tersebut diterbitkan pada tahun 2022.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka sangat penting bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan inisiatif dalam menjaga data pribadi setiap orang, khususnya yang berkaitan dengan sistem KTP elektronik bagi masyarakat. Dirjen Dukcapil serta kemendagri bekerja sama dengan Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kota Surabaya mengusulkan inovasi reformasi untuk meningkatkan sistem pelayanan kependudukan di Kecamatan Bulak Banteng Kota Surabaya.

Salah satu upaya efektif dalam menjaga data pribadi adalah melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), yaitu layanan online yang diakses menggunakan ponsel pintar sebagai pengganti KTP elektronik sebenarnya. Penelitian ini mempunyai tujuan guna melakukan penilaian tingkat inovasi konversi KTP digital menggunakan aplikasi IKD di Kecamatan Bulak Banteng. Inisiatif ini bertujuan untuk melindungi data pribadi individu sekaligus mengkaji tantangan yang dihadapi dan potensi keuntungan yang bisa diperoleh.

METODE

Penelitian ini memakai metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Strategi ini berupaya mengungkap informasi terkait dan memperoleh pemahaman secara keseluruhan dengan melakukan pengamatan secara ekstensif serta organik. Tujuan inti dari penelitian ini yakni guna mengetahui proses implementasi transformasi e-KTP menjadi KTP Digital di Kecamatan Bulak Banteng

dengan menggunakan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Selain itu, penelitian ini mempunyai tujuan guna melakukan identifikasi tantangan yang dilawan, perkiraan manfaat, dan mengevaluasi keuntungan dan kerugian yang terkait dengan aktivasi KTP Digital. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara menyeluruh dan menyeluruh guna memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap topik yang diteliti.

Berbagai pendekatan pengumpulan data digunakan, seperti melakukan wawancara, melakukan observasi langsung, dan mengumpulkan catatan pribadi dan resmi. Data sekunder memegang peranan penting sebagai sumber data pada penelitian ini. Data sekunder meliputi bahan yang didapatkan dari beberapa sumber, antara lain korespondensi pribadi, jurnal, dan catatan resmi yang bersumber dari badan pemerintah terkait. Partisipan penelitian ini terdiri dari warga Kecamatan Bulak Banteng dan petugas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di kecamatan yang sama.

Dengan berpartisipasi aktif, penelitian ini mempunyai tujuan guna memperoleh pemahaman yang lebih detail perihal proses transformasi e-KTP menjadi KTP digital melalui aktivasi IKD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Surabaya sebagai salah satu pengusung kota pintar (*Surabaya Smart City*) berbasis digital yang mengusung konsep seluruh layanan publik dapat diakses melalui satu laman jaringan (Amalia et al., 2023). Surabaya yakni kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 31 kecamatan dan mempunyai total 154 kecamatan. Topiknya seputar pelayanan publik terkait administrasi

kependudukan di Kecamatan Bulak Banteng yang berjumlah 8 RW. Fokus utamanya adalah pada pengelolaan IKD dan pencetakan ulang KTP.

Pengenalan layanan pembuatan IKD dengan sistem baru ini akan mulai disosialisasikan di Desa Bulak Banteng pada bulan April 2023. Sebelum Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri meluncurkan inovasi aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital), Disdukcapil Kota Surabaya, khususnya dikelurahan Bulak Banteng pada saat permohonan cetak ulang KTP masih menggunakan satu laman Aplikasi KNG (Klampi New Generation) dan masyarakat diminta untuk menulis formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (F1-02).

Namun, realisasi penerapan Aplikasi IKD yang diusulkan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sebagai konversi e-KTP menjadi KTP digital belum mencapai hasil yang diharapkan. Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dikelurahan Bulak Banteng terhitung 27.285 Ribu Masyarakat yang telah memiliki akun/aktivasi Identitas Kependudukan Capaian tersebut dinilai masih sedikit dari 8 sekian persen dari jumlah wajib KTP. Kendala tersebut dikarenakan rendahnya minat masyarakat melakukan aktivasi IKD, banyak masyarakat yang tidak memiliki telepon genggam, keterbatasan jaringan dan pengetahuan terhadap teknologi. Dinas Dukcapil Kota Surabaya mempunyai tugas untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengaktifkan IKD.

Aplikasi IKD Digital menyediakan layanan pencatatan dokumen kependudukan dan informasi pribadi warga (1Fikri Pramudya Putra, 2023). Layanan ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat yang menjamin akses informasi publik yang transparan dan

terpercaya dengan tetap mengedepankan privasi dan keamanan. Masyarakat kerap mempertanyakan keamanan data pada aplikasi KTP digital. Situs resmi Dirjen Dukcapil Kemendagri menyebutkan, KTP digital pada aplikasi IKD kini telah ditingkatkan pengamanannya. Fitur-fiturnya mencakup penerapan sistem otentikasi berbasis kata sandi, pembatasan fungsi tangkapan layar, dan penggunaan kode QR yang kedaluwarsa setelah waktu singkat 90 detik. Langkah-langkah ini diterapkan untuk memastikan keamanan data, melarang akses tidak sah terhadap informasi, dan memberi perlindungan data pribadi dari penyebaran yang tidak diharapkan. Pemerintah memberi jaminan kerahasiaan dan integritas data yang tersimpan di KTP digital ini serta akan terus menyempurnakan sistemnya guna mencukupi keperluan masyarakat yang terus berkembang. Disdukcapil juga bekerja sama dengan kepolisian dalam melindungi data masyarakatnya.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dibuat oleh Ditjen Dukcapil secara mandiri, sehingga tidak perlu bergantung pada pihak lain atau anggaran khusus untuk pengembangannya. Selain itu, penerapan sistem Aplikasi Identitas Kependudukan (IKD) Digital juga efektif mengurangi biaya verifikasi data dalam pelayanan publik. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menawarkan berbagai fitur antara lain KTP digital dan data berharga yang dikategorikan dalam enam menu: Dokumen Data Keluarga, Tanda Tangan Elektronik, Layanan, Pemantauan Layanan, Riwayat Aktivitas, Ubah PIN/Kata Kunci, Hapus Perangkat, dan Deskripsi.

Menu Dokumen berisi statistik demografi yang disajikan dalam bentuk kode QR, yang hanya dapat dipindai oleh perangkat lain yang dilengkapi program IKD. Data keluarga terdiri dari Kartu Keluarga (KK)

beserta biodata keluarga dan tambahan Kartu Keluarga (KK). Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan digital yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan blangko fisik yang diluncurkan oleh Ditjen Dukcapil sehingga pengajuan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara fleksibel dan praktis pada perangkat elektronik masing-masing.

Berikut adalah menu layanan yang tersedia pada Aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital):



Gambar IKD

Berikut cara Aktivasi KTP digital pada aplikasi IKD:

1. Pastikan Anda mempunyai smartphone Android atau iOS yang dilengkapi dengan koneksi internet yang andal.
2. Instal aplikasi IKD pada perangkat seluler Anda.
3. Luncurkan aplikasi IKD serta pilih opsi "Daftar".
4. Harap berikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, serta nomor ponsel aktif guna keperluan pendaftaran KTP Digital.
5. Validasi data dengan memilih tombol "verifikasi data".
6. Ambil potret diri tanpa memerlukan kacamata atau penutup wajah dengan memilih tombol opsi "Ambil Foto".
7. Sesudah proses registrasi ponsel selesai, Anda perlu menghubungi petugas

Dukcapil atau kantor kecamatan setempat guna melakukan scan barcode.

8. Setelah memindai kode batang, akses email yang digunakan untuk pendaftaran, duplikat kode PIN digit, kemudian pilih tombol "Aktivasi".
9. Masukkan kode aktivasi dan kode captcha sesuai perintah, lalu klik tombol "Aktifkan".
10. Selanjutnya luncurkan aplikasi IKD dan pilih fitur "Cek status". Lanjutkan dengan memasukkan PIN yang terdaftar.

KTP digital dan KTP elektronik berbeda dari segi wujud fisiknya. KTP elektronik merupakan kartu berwujud yang bisa diakses oleh perorangan. Sedangkan KTP digital terdiri dari KTP foto dan kode QR. Dalam tata cara penerbitannya, KTP elektronik dilakukan pencetakan oleh Disdukcapil Kota Surabaya setelah diserahkan oleh petugas kecamatan.

Saat ini, untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), perlu memberikan bukti kepemilikan Aplikasi IKD Digital. Berbeda dengan KTP digital yang disimpan di ponsel warga dan tidak perlu dicetak, cara ini berbeda. KTP elektronik bisa disimpan di dompet atau tempat penyimpanan kartu, sedangkan KTP digital disimpan di ponsel. KTP elektronik dapat diakses secara offline, sedangkan KTP digital memerlukan koneksi internet untuk mengaksesnya.

Namun, pada saat pengajuan dalam aktivasi terkendala jaringan/tidak memiliki Hp nantinya petugas kelurahan akan memberikan surat pernyataan sebagai dokumen pengganti persyaratan dalam pengajuan cetak ulang KTP.

Terdapat tambahan disparitas dalam hal kemudahan antara KTP elektronik dan KTP digital. Meski sudah menerapkan KTP elektronik, masyarakat seringkali memerlukan fotokopi KTP untuk berbagai

prosedur administrasi. Namun demikian, pengenalan KTP digital bertujuan untuk menghilangkan kebutuhan akan fotokopi, sehingga meningkatkan kenyamanan bagi individu.

Keunggulan utama KTP digital antara lain sifatnya yang mudah digunakan, proses pembuatan yang lebih cepat, tidak perlu lagi pencetakan fisik, kemudahan penyimpanan di ponsel atau smartphone Android, tidak lagi wajibnya fotokopi KTP untuk mengakses layanan publik, pengamanan. pendataan kependudukan terhadap pemalsuan, dan penyelesaian permasalahan KTP yang hilang. Selain itu, KTP digital mempunyai keuntungan berupa penghematan biaya yang cukup besar karena tidak diperlukan lagi pembuatan atau pencetakan formulir KTP fisik.

Meskipun tidak bersifat wajib, penerapan KTP digital diharapkan dapat memberikan insentif kepada individu agar bersedia beralih ke layanan digital di masa depan. Sebagai gambaran, seorang warga yang berdomisili di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, berhasil mengaktifkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital miliknya karena fisik e-KTP dalam kondisi terdegradasi.

“Saya baru saja mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital saya karena e-KTP saya tidak terbaca. Aktivasi KTP digital ini sangatlah mudah karena adanya instruksi yang jelas dari petugas. Meski demikian, saya masih bingung mengenai tujuan dari KTP digital. Apalagi, akhir-akhir ini saya menyadari masih minimnya informasi mengenai kebijakan baru yang mewajibkan aktivasi KTP digital sebelum mencetak ulang KTP”, kata ibu Ningsih selaku warga Bulak Banteng.

Saya baru saja mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital saya karena e-KTP saya tidak terbaca. Aktivasi KTP digital ini sangatlah mudah karena

adanya instruksi yang jelas dari petugas. Meski demikian, saya bingung mengenai tujuan dari KTP digital. Apalagi, akhir-akhir ini saya menyadari masih minimnya informasi mengenai kebijakan baru yang mewajibkan aktivasi KTP digital sebelum mencetak ulang KTP.

“Kebijakan ini masih kami ikuti karena menurut petugas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Kelurahan Bulak Banteng, hal ini dalam rangka menanggulangi kekurangan stok blanko KTP. Alhamdulillah sudah ada 27.285 Ribu Masyarakat yang sudah aktivasi KTP digital/IKD terhitung januari 2024,” Ibu Ernawati petugas SIAK di kelurahan Bulak Banteng. Berikut adalah Kegiatan wawancara penulis dan Informan petugas SIAK di kelurahan Bulak Banteng



Berdasarkan hasil wawancara, layanan aktivasi KTP digital berfungsi efektif. Sayangnya, upaya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai penggunaan KTP digital dan cara aktivasinya masih kurang. Perlu adanya upaya komunikasi yang luas dan tepat sasaran untuk memastikan masyarakat Kecamatan Bulak Banteng mengetahui kebijakan aktivasi KTP digital sebelum mengajukan permohonan cetak ulang KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Surabaya dan Bulak Banteng mempunyai tugas krusial dalam mengkomunikasikan dan mengedukasi masyarakat tentang aktivasi layanan KTP digital melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Untuk

mencapai tujuan ini, mereka dapat melakukan banyak upaya seperti mengorganisir inisiatif penjangkauan atau menyebarkan informasi secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, mereka dapat memanfaatkan berbagai bentuk media seperti spanduk, baliho, dan iklan baik dalam format cetak maupun elektronik. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat dimanfaatkan, seperti memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan YouTube.

Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan informasi yang ringkas dan mudah diakses kepada masyarakat umum mengenai tata cara dan manfaat aktivasi KTP digital. Dengan memanfaatkan beragam saluran komunikasi, baik platform konvensional maupun digital, tujuannya adalah memastikan pesan yang disampaikan dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan berdampak.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Upaya ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya aktivasi KTP digital dan prosedur yang diperlukan untuk memanfaatkan layanan ini.

Dengan semakin berkembangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, diharapkan akan semakin besar pula minat partisipasi masyarakat dalam aktivasi KTP digital melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hal ini pada gilirannya akan membantu keberhasilan implementasi transformasi dari e-KTP ke KTP Digital dalam administrasi kependudukan.

PENUTUP

Identitas Populasi Digital mengacu pada representasi digital unik dari informasi dan karakteristik pribadi seseorang. Jika dilaksanakan secara efektif, inisiatif ini akan memberikan manfaat besar bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bisa menghemat pengeluaran anggaran dengan meminimalisir pengadaan formulir KTP elektronik.

Selain itu, masyarakat juga akan semakin merasakan kemudahan karena tidak diperlukan lagi KTP elektronik fisik dalam proses pelayanan. Efisiensi pengelolaan operasional di bidang perbankan, kewirausahaan, kesehatan, perpajakan, pendidikan, dan asuransi kesehatan. Layanan ditingkatkan dalam hal kecepatan, akurasi, dan efisiensi. Data terhubung secara lancar dengan data demografi, sekaligus memastikan langkah-langkah keamanan data yang kuat.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital menawarkan banyak keuntungan, namun terdapat beberapa tantangan dalam melakukan Transformasi Digital dengan teknologi ini. Masalah ini dapat diatasi dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat secara terus-menerus sangat penting untuk mendorong aktivasi aplikasi dan menyoroti keunggulan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam layanan pengelolaan kependudukan.
- 2) Optimalkan pemanfaatan platform media sosial seperti Instagram dan YouTube.

REFERENSI

- Amalia, D., Nesya, N., & Tyrta, M. (2023). *MINISTRATE Implementasi Kota Pintar (Smart City) Di Kota Surabaya*.

- In *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* (Vol. 5, Issue 1).
- Apriliani, D., Rahman, B., & Ibrahim, D. (2021). *Digitalisasi Pelayanan Publik (Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android Di Kabupaten Bangka)* 2021. <http://sosains.greenvest.co.id>
- Danuri, M., Informatika, M., Teknologi, J., & Semarang, C. (2019). *PERKEMBANGAN DAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI DIGITAL*
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Firmansyah & Anisykurlillah. 2023. *Inovasi Pelayanan E-KTP Berbasis Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang*
- Prasetyo, T., Zakaria, H., & Wiliantoro, P. (2022). *OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer dan Sains Analisis Layanan Pelanggan PT PLN Berdasarkan Media Sosial Twitter Dengan Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier*. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/oktal>
- Rukayat, yayat. (2017). *KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN PASIRJAMBU*.
- Salsabila, S., Zetra, A., & Putera, R. E. (2022). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 314–324. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i2.65>
- Sinaga Erlina maria christin & Putri mery christian. (2020). *FORMULASI LEGISLASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0*. <https://www.bps.go.id/publication/2019/07/04/daac1ba18cae1e90706ee58a/>
- Sri Maulidiah, R. R. M. R. S. (2023). *Inovasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau*.
- Trisna, E., & Azizah, P. (2022). *Analisis Penerapan Standar Layanan Publik... Analisis Penerapan Standar Pelayanan Publik Pembuatan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Surabaya* Creswell, John W. 2010. *Research Design - Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Dinamika, J., Dan, M., & Publik, K. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Situs Web (Media Center) Diskominfo*.
- Ideal, I.R.(1) “Efektivitas Kinerja PPID pada Sekretariat DPRD Kota Padang Dalam memberikan Keterbukaan Informasi kepada Publik”, *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(2), pp.218-226. Available at : <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/43>
- Irawan, Prasetya.2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*. Depok : Departemen Ilmu Administrasi Fisip UI;
- Kapahang, S. E., Mingkid, E., & Kalesaran, E. R. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1).
- Nupikso, Daru. 2017. *Kinerja Badan Publik dalam Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta*;

- Pratiwi, Feni Rizky. 2015. Kinerja Pelayanan Informasi Publik di Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi banten;
- Runata, Vience Mutiara. Implementasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Surabaya;
- Sahara, Cikal Fairuz. Kinerja PPID dalam Pemenuhan Informasi Publik di Kabupaten Karawang;
- Simanjuntak. 2005. Manajemen Dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sugiyono, 2008. Statistika untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung;
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Penerbit Alfabet. H
- Trijayanto, Danang & Aidar, Iqbal. Peran PPID Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol 3 no 1 (2019):IKRA-ITH HUMANIORA Vol 3 No 1 Bulan Maret 2019;
- Zulaikha, Z., & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies), 1(2), 131–162.